



# Akuntabilitas Komitmen Indonesia Pada G20



Penyunting :  
Irfa Ampri, Syurkani Ishak Kasim, Yulius Purwadi Hermawan

# **Akuntabilitas Komitmen Indonesia pada G20**

## **Penyunting**

Irfa Ampri  
Syurkani Ishak Kasim  
Yulius Purwadi Hermawan

## **Tim Penyusun**

Yulius Purwadi Hermawan  
Syurkani Ishak Kasim  
Irfa Ampri  
Elizabeth Tiur Manurung  
Ivantia Mokoginta  
Nanang Zaenal Arifin  
PC Suroso  
Rakhmindyarto  
Ratih Indraswari  
Regina P. Mboeik  
Rulyusa Pratikto  
Siwi Nugraheni  
Yanuarita Hendrani

# Akuntabilitas Komitmen Indonesia pada G20

Diterbitkan oleh : Pusat Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim dan Multilateral  
Badan Kebijakan Fiskal,  
Kementerian Keuangan RI

Layout & Design Cover : Oktariany dan Denny

Cetakan Kesatu : Oktober, 2013

ISBN : 978-602-18738-1-6

Alamat : Pusat Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim dan Multilateral, Gedung Radius Prawiro, Lantai 6  
Jl. Dr. Wahidin No. 1, Jakarta 10710  
Tel. : 021-34831678  
Fax. : 021-34831677  
Email : [G20indonesia@depkeu.go.id](mailto:G20indonesia@depkeu.go.id)

## Hak Cipta dilindungi Undang-Undang

### Pasal 44

- (1) Barang siapa dengan sengaja atau tanpa hak mengumumkan atau memperbanyak suatu ciptaan atau memberi izin untuk itu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan atau denda paling banyak Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah)
- (2) Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)

### *Disclaimer*

Dengan ini dinyatakan bahwa tulisan yang dimuat dalam buku ini tidak secara otomatis mewakili sikap dan pandangan resmi dari Kementerian Keuangan atau Pemerintah Republik Indonesia. Oleh karenanya pertanggungjawaban atas isi tulisan tersebut sepenuhnya berada di tangan Tim Penyusun yang bersangkutan.

## SAMBUTAN

### MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

Forum G20 yang beranggotakan dua puluh negara industri maju dan negara berkembang berpendapatan menengah (*emerging markets*) telah melakukan berbagai kebijakan dan tindakan terobosan yang signifikan dalam empat tahun terakhir. Negara-negara anggota G20 sepakat untuk menggunakan pendekatan yang lebih kolaboratif dalam membuat desain dan evaluasi kebijakan bagi perbaikan kondisi perekonomian dunia yang saling tergantung dan terkoneksi. Berbagai realitas ekonomi yang terjadi menunjukkan bahwa kebijakan satu negara, khususnya negara besar, akan mempengaruhi perekonomian negara lainnya.

Tindakan antisipatif kolektif negara G20 dalam merespon krisis global merupakan langkah yang sangat tepat untuk menghindari krisis keuangan besar lainnya di masa mendatang. Berbagai kebijakan yang dilakukan berbagai negara termasuk stimulus makroekonomi dan intervensi sektor keuangan berhasil menghindari terjadinya kondisi yang terburuk dari krisis ekonomi.

Pada G20 *Summit* ketiga di Pittsburgh, Amerika Serikat, tahun 2009, para pemimpin G20 telah mengadopsi kebijakan pemulihan krisis dan meletakkan komitmen mendukung pertumbuhan ekonomi global yang kuat dalam jangka panjang. Para pemimpin sepakat untuk menyusun dan melaksanakan *Framework for Strong, Sustainable, and Balance Growth (FSSBG)*. Landasan dari FSSBG tersebut adalah komitmen dan tindakan terkoordinasi (*coordinated actions*) yang mana setiap negara anggota G20 menetapkan tujuan dan kebijakan domestik yang mendukung arah pencapaian kerangka tersebut. Negara-negara G20 melakukan "*mutual assessment*" terhadap kemajuan dari komitmen yang telah diajukan oleh setiap negara anggota G20 tersebut melalui *Mutual Assessment Process (MAP)*.

MAP merupakan pendekatan baru untuk kolaborasi kebijakan yang sepenuhnya dimiliki oleh negara anggota G20. Tujuan dari MAP adalah untuk memastikan bahwa kebijakan kolektif akan menguntungkan semua negara anggota G20, walaupun komitmen masing-masing negara dapat saja berubah dan bertambah sesuai dengan kondisi setiap negara. Untuk mendukung agar komitmen kolektif tersebut dapat berjalan dengan baik, negara anggota G20 telah mengisyaratkan untuk berpartisipasi penuh dalam memberikan informasi yang dibutuhkan untuk analisis dan evaluasi.

Pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Toronto tahun 2010, para pemimpin G20 sepakat bahwa negara-negara G20 dapat meningkatkan kinerja ekonomi untuk mencapai tujuan *strong, sustainable, and balanced growth* dengan bekerja sama melakukan reformasi struktural yang mencakup empat area utama, yaitu fiskal, moneter, sektor keuangan, dan pembangunan. Untuk mencapai pertumbuhan yang kuat, berkelanjutan dan berimbang, masing-masing anggota G20 telah mengidentifikasi berbagai kebijakan yang akan ditempuh yang dipandang membantu pencapaian hasil yang lebih baik dalam pertumbuhan ekonomi.

Namun demikian, dengan kondisi perekonomian global saat ini yang cenderung semakin melemah, negara-negara G20 perlu merumuskan kembali kebijakan dan regulasi yang diperlukan, termasuk melakukan reformasi struktural yang mendorong pertumbuhan dan memperkuat koordinasi diantara negara-negara G20 di semua area. Dalam konteks ini, Indonesia telah berpartisipasi aktif dalam berbagai pertemuan G20 dalam mendukung agenda peningkatan pertumbuhan ekonomi global. Pada tatanan domestik, Indonesia melakukan evaluasi berbagai kebijakan dan implementasi fiskal jangka menengah dan melaksanakan reformasi struktural yang diperlukan.

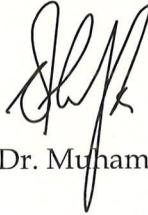
Di luar dari mekanisme MAP dan *enhanced accountability assessment*, penilaian komitmen juga dilakukan oleh pihak luar secara independen, termasuk oleh tim riset IORI dari Higher School of Economics, National Research University dan Munk School of Global Affairs, University of Toronto. Metode penilaian didasarkan atas berbagai laporan lembaga-lembaga keuangan internasional seperti IMF, World Bank, OECD, FSB, BCBS, maupun IEA. Dalam hal ini, Pemerintah Indonesia menyambut baik partisipasi pihak independen untuk menilai kinerja setiap negara anggota G20. Terlepas dari keakuratan data dan informasi yang diperoleh oleh berbagai institusi tersebut, Indonesia memandang hasil penilaian tersebut dapat menjadi acuan perbaikan bagi pemenuhan komitmen masing-masing negara dan juga dukungan terhadap pemulihan perekonomian global.

Sebagai pertanggungjawaban kepada publik, Indonesia perlu pula melakukan *self-evaluation* untuk pemenuhan komitmen-komitmen keikutsertaan Indonesia di forum G20. Untuk itu, kami menyambut baik dilakukannya penelitian dan *self-evaluation* oleh Pusat Kebijakan Pembiayaan Iklim dan Multilateral, Badan Kebijakan Fiskal bekerja sama dengan Universitas Parahyangan sebagai acuan atau pembanding atas hasil penilaian yang dilakukan oleh lembaga riset internasional. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjelaskan kepada para *stakeholders* dan publik dengan bahasa yang sederhana mengenai pencapaian berikut tantangan yang dihadapi Indonesia dalam memenuhi kesepakatan G20 dan komitmen yang telah disampaikan.

Kami menyampaikan ungkapan apresiasi dan terima kasih kepada Tim Penyusun Buku atas terealisasinya penerbitan buku tentang G20 yang mengupas pencapaian Indonesia dalam pemenuhan komitmennya. Semoga buku ini dapat memenuhi minat dan kebutuhan pemangku kepentingan dan pemerhati kerja sama internasional, dan dapat digunakan sebagai salah

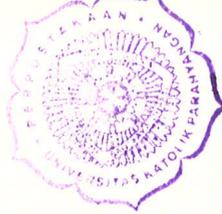
satu sumber referensi dan informasi tentang perkembangan keikutsertaan dan peran Pemerintah Indonesia dalam forum G20 khususnya terkait dengan pencapaian komitmen Indonesia di forum utama dunia ini.

Jakarta, Oktober 2013  
Menteri Keuangan Republik Indonesia



Dr. Muhammad Chatib Basri

## DAFTAR ISI



Sambutan Menteri Keuangan RI	v
Sambutan Sherpa Indonesia untuk Forum G20	ix
Kata Pengantar Kepala Badan Kebijakan Fiskal	xi
Pernyataan dan Ucapan Terimakasih	xv
Daftar isi	xvii
Ringkasan Eksekutif	xxiii
Pendahuluan	1
Evaluasi Akuntabilitas dan Efektivitas G20 (Tinjauan Pustaka)	9
Konsolidasi Fiskal dan Komitmen Indonesia pada G20	39
Peranan Perekonomian Indonesia terhadap Ketidakseimbangan Global	53
Stimulasi Reformasi Struktural	69
Kontribusi Indonesia pada Lembaga Keuangan Internasional	93
Reformasi Regulasi Keuangan	107
Penghindaran Kebijakan Proteksionis	135
Pembatasan Subsidi Bahan Bakar Fosil dan Peningkatan Efisiensi Energi	149
Pembangunan Infrastruktur	165
Pelaksanaan Program Keuangan Inklusif di Indonesia	191
Penyediaan <i>Official Development Assistance</i>	203
Kesimpulan dan Rekomendasi	225



# PENDAHULUAN

Sejak ditingkatkan status G20 dari pertemuan para menteri keuangan dan gubernur bank sentral menjadi pertemuan tingkat para pemimpin pemerintahan di tahun 2008, nama G20 mulai dikenal jauh lebih luas di masyarakat internasional.<sup>1</sup> Perubahan ini menjadikan pertemuan-pertemuan G20 memiliki dampak yang lebih besar karena pemimpin-pemimpin yang hadir dapat membuat kesepakatan yang memiliki implikasi penting dalam implementasinya. Peran G20 ini juga dipengaruhi oleh krisis keuangan yang saat itu melanda Amerika Serikat. Klaim atas tanggung jawab global untuk penyelesaian krisis dan pembangunan perekonomian global yang kuat menjadikan forum G20 yang beranggotakan sembilan belas negara dan satu organisasi regional ini berdampak sangat luas.

Sebagai salah satu negara anggota G20, Indonesia meraih satu pencapaian yang besar untuk melanjutkan kiprahnya dalam forum multilateral regional maupun global. Forum *high-profile* ini mendorong Pemerintah Indonesia untuk lebih pro-aktif dan tampil percaya diri dalam berbagai forum-forum multilateral lain. Keanggotaan di G20 telah memberikan tempat istimewa bagi Indonesia untuk meningkatkan citranya, menjadi satu negara yang cukup diperhitungkan dalam perekonomian global.

Sebagai bagian dari komitmen untuk berpartisipasi aktif dalam forum G20, Indonesia telah berupaya untuk memainkan peran pentingnya baik sebagai *negara berkembang berpendapatan menengah* maupun mengedepankan kepentingan 'negara berkembang' lain.<sup>2</sup> Salah satu contoh misalnya, dalam kapasitas sebagai ketua *Anti Corruption Working Group* bersama-sama

1 Yulius P Hermawan, et.al. (2011). *The Role of Indonesia in the G20: Background, Role and Objectives of Indonesia's Membership*. Jakarta: FES.

2 Syurkani, et.al. (eds). (2012). *G20, Ekonomi Global dan Peran Indonesia*. Jakarta: Pusat Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim dan Multilateral, Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan RI.

Perancis, Indonesia berupaya memainkan peran *bridging* di antara negara-negara maju dan negara berkembang. Sejak KTT Seoul (2010), Indonesia telah memainkan peran penting dalam menyusun agenda pembangunan dalam pertemuan kelompok kerja pembangunan G20. Peran penting ini juga diperlihatkan Indonesia dalam mendukung kebijakan keuangan inklusif menjadi salah satu inisiatif penting dalam KTT Meksiko (2012). Dengan upaya ini, Indonesia terus berupaya untuk merealisasikan misi G20 untuk membangun perekonomian global yang bertumbuh secara kuat, berimbang, berkelanjutan dan sekaligus tahan terhadap krisis.

Sejumlah komitmen telah dibuat dalam forum G20 untuk memastikan bahwa forum ini dapat akan mencapai misi globalnya. Dalam hal ini, pemerintah Indonesia menyadari bahwa pemenuhan komitmen (*compliance*) merupakan suatu keharusan yang sangat penting. Tanpa pemenuhan komitmen sepenuhnya oleh semua negara anggota G20, maka akan sangat sulit sekali mengharapkan G20 dapat berfungsi secara efektif dan mempertahankan kredibilitasnya sebagai forum utama ekonomi dunia. Pemenuhan komitmen oleh negara anggota merupakan tantangan mempertahankan kredibilitas dan akuntabilitas forum G20 sebagai forum utama ekonomi global.

Buku ini disusun dari hasil kajian evaluasi komitmen Indonesia dalam forum G20 yang dilaksanakan oleh Bidang Forum G20, Badan Kebijakan Fiskal (BKF), Kementerian Keuangan Republik Indonesia bekerjasama dengan Tim Peneliti G20 Universitas Katolik Parahyangan. Kajian tersebut menyajikan telaah dan evaluasi atas tujuh aspek komitmen, yaitu: (1) Konsolidasi Fiskal, (2) Reformasi Struktural, (3) Reformasi Lembaga Keuangan Internasional (IFIs), (4) Reformasi Regulasi Keuangan Global, (5) Penghindaran Kebijakan Proteksionis, (6) Penghapusan *Fossil Fuel Subsidy*, dan (7) Pembangunan.

Kajian atas evaluasi komitmen ini dipandang mendesak untuk dilakukan atas dasar dua argumen. Argumen pertama yang sangat penting adalah kesadaran untuk melakukan

suatu *self-assessment*, sejauh mana Indonesia telah menjalankan komitmen-komitmennya dalam forum G20. Terkait dengan kepentingan ini, evaluasi diri menjadi penting pula untuk menyusun suatu kerangka nasional bagi penerapan komitmen Indonesia dalam G20.

Argumen kedua adalah sebagai tanggapan atas hasil kajian yang dibuat oleh IORI, Higher School of Economics, National Research University dan G20 Research Group Munk School of Global Affairs, University of Toronto. Laporan kajian yang dibuat oleh kedua lembaga secara kolaboratif tersebut pada awalnya menempatkan Indonesia pada ranking 19 dari 20 negara anggota G20 dengan skor 0.14 (rentang -1 - +1). Menurut hasil kajian kolaboratif tersebut, kepatuhan Indonesia yang dinilai sangat lemah (skor minus berarti belum melaksanakan) adalah pada implementasi komitmen reformasi struktural (skor: -0,2), komitmen untuk menghindari proteksionisme dalam perdagangan (skor: -1) dan komitmen pembangunan (skor -0,24). Indonesia juga dinilai sebagai negara yang belum *full compliance* (pemenuhan komitmen secara penuh) dalam konsolidasi fiskal, reformasi lembaga keuangan, dan reformasi regulasi keuangan. Evaluasi terhadap komitmen Indonesia di bidang Pembangunan juga dinilai rendah. Indonesia mendapat skor minus 1 untuk pemenuhan komitmen dalam penyediaan akses ke perdagangan, peningkatan pendapatan negara, ODA (bantuan pembangunan resmi), dan kontribusi pendanaan pada bank-bank pembangunan multilateral.

Namun dalam evaluasi dan kajian yang dilaksanakan beberapa waktu kemudian oleh lembaga yang sama, Indonesia diberikan ranking lebih baik, naik dari ranking 19 ke ranking tujuh. Hasil ini cukup menggembirakan. Namun demikian dalam catatan tim penyusun, pencapaian ini masih belum menggambarkan kondisi yang sebenarnya terkait pemenuhan komitmen Indonesia. Salah satunya adalah bagaimana metoda kajian yang digunakan oleh kedua lembaga independen tersebut masih belum sepenuhnya baku. Dalam menjawab

kondisi tersebut, Tim G20 Indonesia sendiri yang berada di bawah Kementerian Keuangan secara aktif melakukan diskusi dan pendalaman hasil evaluasi untuk mendapatkan gambaran yang lebih utuh dan akurat mengenai pemenuhan komitmen Indonesia tersebut. Apabila hal ini tidak dilakukan, dan bila hasil penelitian dari kedua lembaga tersebut diterima begitu saja, dikhawatirkan memunculkan persepsi bahwa Indonesia tidak sepenuhnya konsisten dengan keterlibatan aktifnya dalam proses G20.

Buku ini merupakan hasil kajian evaluatif secara independen, kolaborasi antara unit kerja G20 di Kementerian Keuangan (Badan Kebijakan Fiskal) dan Universitas Katolik Parahyangan dengan mengumpulkan informasi dan mengkaji kebijakan-kebijakan nasional Indonesia yang menunjukkan upaya Indonesia untuk mengimplementasikan komitmen-komitmennya yang dibuat dalam forum G20. Data-data tersebut diolah dan dikombinasikan dengan data sekunder yang dipublikasikan di jurnal dan media massa baik cetak maupun *on-line*. Data diseleksi dan diolah secara deskriptif dalam suatu kerangka perspektif konseptual-akademik. Laporan awal kajian telah didiskusikan dalam *Focus Group Discussion* dengan melibatkan perwakilan kementerian dan lembaga-lembaga terkait yang diselenggarakan pada tanggal 25 Juni 2013.

Tujuh aspek komitmen dalam buku ini meliputi konsolidasi fiskal, reformasi struktural, reformasi lembaga keuangan internasional, reformasi regulasi keuangan, penghindaran kebijakan proteksionis, pembatasan subsidi bahan bakar fosil, dan pembangunan.

**Komitmen konsolidasi fiskal** mencakup upaya mengurangi defisit pembelanjaan dan stabilisasi utang, penguatan rencana penyesuaian nasional dengan koordinasi internasional, *peer pressure* dan peningkatan pengawasan oleh lembaga-lembaga internasional. Konsolidasi fiskal dipandang penting sebagai kunci untuk mengurangi "*current account deficits*" yang diharapkan dapat mendorong "*global rebalancing*"

di sejumlah negara-negara besar.

Terlepas dari hasil kajian tim peneliti IORI Moskow yang memberikan nilai minus 1 untuk upaya Indonesia mendorong *rebalancing* melalui konsolidasi fiskal karena gagal mengurangi separuh defisit anggaran di tahun 2013, Buku ini berhasil mengedepankan fakta bahwa Indonesia berhasil dalam menjaga stabilitas atau bahkan mengurangi rasio utang terhadap GDP. Kajian ini fokus untuk menganalisa bagaimana kebijakan pemerintah untuk memperkuat konsolidasi fiskalnya baik melalui pengurangan defisit anggaran dan stabilitasi utang serta *adjustment policy*.

**Komitmen reformasi struktural** dipandang sangat penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang kuat. Reformasi struktural mencakup liberalisasi pasar, penguatan pasar tenaga kerja dan pengembangan sumber daya manusia, dan reformasi pajak. Dalam aspek reformasi struktural, performa pemenuhan Indonesia dan Turki dinilai paling rendah oleh peneliti Tim Riset IORI, Higher School of Economics, National Research University dan Munk School of Global Affairs, University of Toronto. Untuk aspek liberalisasi pasar Indonesia mendapat skor minus 1; untuk penguatan *labor market* dan pengembangan pendidikan serta pembangunan infrastruktur mendapat nilai 0.

Reformasi/liberalisasi pasar dimaksudkan untuk menyederhanakan regulasi dan mengurangi hambatan-hambatan regulasi dalam upaya untuk mempromosikan kompetisi dan meningkatkan produktivitas di sektor-sektor kunci. Komitmen Indonesia yang dicatat adalah '*simplifying product market regulations*'. Pengembangan sumber daya manusia termasuk perbaikan skema benefit, edukasi dan training dimaksudkan untuk meningkatkan sektor tenaga kerja yang berkualitas. Reformasi struktural ini diharapkan dapat meningkatkan produktivitas dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Indonesia secara khusus berkomitmen untuk memperbaiki tingkat pendidikan menengah.